

PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM KOTA BONTANG

Muh. Ridwan¹, Hartutiningsih², Mass'ad Hatuwe³

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the development of SMEs in Departement of Industry, Cooperative, Trade and SMEs of Bontang. The result of research indicate that generally, the development of Small and Medium Enterprises (SME) in Department of Industry Cooperative Trade and SMEs of Bontang has been going well and very beneficial to the development of SMEs, but in fact, they have not been fully achieve the optimal result. Even though, the government effort to develop SMEs always done with great sustainability. The factor that obstruct development of SMEs are the lack of skillful personnel especially instructor and companions, most of the existing instructor personnel in Department of Industry Cooperative Trade and SMEs of Bontang not in accordance with the competence (basic education owned), limited budget allocations for SMEs development activities makes not every program and planning can be accomplished, attitude and behavior of SMEs performer that always depend on government assistance, performer characteristic and mindset is not easy to change, and lack of preparation to hold the activity.

Keyword : *Bontang SMEs Development*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembinaan IKM pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang secara umum sudah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat terhadap pengembangan usaha pelaku IKM, namun secara aplikatif serta hasil yang dicapai belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal . Meski demikian upaya pembinaan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang terhadap IKM terus dilakukan secara berkesinambungan serta berjalan dengan baik. Adapun faktor yang menghambat terhadap pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang adalah kurangnya jumlah aparat pembina IKM khususnya

¹Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

²Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

³Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

tenaga penyuluh dan pendamping, sebagian aparat pembina IKM yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang tidak sesuai dengan kompetensi (basic pendidikan yang dimiliki), terbatasnya kemampuan aparat Pembina IKM, terbatasnya alokasi anggaran untuk keperluan kegiatan pembinaan IKM sehingga tidak semua program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana, adanya sikap dan perilaku IKM yang terkesan manja sehingga selalu mengharapkan bantuan pemerintah, karakteristik dan pola pikir pelaku IKM tidak mudah untuk berubah, kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan.

Kata Kunci : Pembinaan IKM Bontang

Pendahuluan

Industri kecil mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam pembangunan, industri kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha.

Pentingnya peranan industri kecil dalam mengembangkan perekonomian nasional ditunjukkan dengan ditetapkannya Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optima dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya diikuti dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Inti dari peraturan ini adalah adanya pengakuan dan upaya untuk memberdayakan mereka. Hal ini sebagaimana yang terungkap dalam PP tersebut bahwa usaha kecil bagian integral dari perekonomian nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional.

Industri kecil dan menengah Industri kecil dan menengah yang ada di Kota Bontang mempunyai peranan yang sangat strategis, baik dalam pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan penyebaran lokasi industri yang mendukung

pembangunan, pemerataan kesempatan kerja, dan bertujuan untuk membentuk masyarakat industri kecil yang mandiri, tangguh, dan berkembang menjadi industri besar.

Berdasarkan data dari Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang, bahwa perkembangan sektor industri kecil dan menengah di Kota Bontang mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga tahun 2010 sedangkan pada tahun 2011 hingga tahun 2012 mengalami penurunan sekitar 25%. Berdasarkan data perkembangan ini, maka dapat menjadi bahan evaluasi atas pembinaan IKM yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang.

Pemerintah Kota Bontang telah melakukan berbagai upaya dalam membina pelaku IKM, yaitu melalui kegiatan pelatihan, promosi, bantuan dana bergulir, bantuan sarana produksi, magang, studi banding, namun upaya pembinaan tersebut belum sepenuhnya dapat menjangkau serta mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaku IKM selama ini.

Permasalahan mendasar untuk sektor industri kecil dan menengah di Kota Bontang adalah seringnya terhambat dengan keterbatasan modal, SDM yang masih kurang mampu, kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, dan sulitnya pemasaran khususnya produk kerajinan. Oleh karena itu perlu adanya terobosan-terobosan dari pihak pemerintah melalui instansi teknis Dinas Perindagkop dan UMKM untuk melakukan pembinaan secara kontinyu dan berkelanjutan agar IKM tetap bertahan dan berkembang.

Hal ini menjadi tugas Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang pengelolaan sector perindustrian yang berupaya untuk membina industry kecil dan menengah agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu factor internal yang ada dalam Dinas Perindagkop dan UMKM itu sendiri maupun factor eksternal yang ada diluar Dinas Perindagkop dan UMKM tersebut.

Berkenaan dengan upaya pembinaan industry kecil dan menengah di Kota Bontang perlu dilakukan pembinaan sesuai bidang usaha yang dijalankan selama ini. Disamping itu perlunya pengembangan kemampuan sumber daya manusia, karena melalui pembinaan tersebut diharapkan berkembangnya usaha industry kecil dan menengah di Kota Bontang.

Dalam upaya pembinaan industry kecil dan menengah memang diperlukan suatu langkah yang tepat sehingga permasalahan yang mengemuka dapat teratasi, dan harapan para pengusaha industry kecil dan menengah untuk sejahtera dapat terealisasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam, mengingat Kota Bontang memiliki potensi dan memiliki peluang yang besar untuk berkembangnya industry kecil dan menengah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengungkap fenomena yang terjadi diobyek penelitian terutama mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kota

Bontang dalam mengembangkan industri kecil dan menengah. Kemudian dapat diketahui pula faktor-faktor yang menghambat terhadap pembinaan industri kecil dan menengah yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka tindakan yang paling tepat dan teruji validitasnya dapat dilakukan melalui pendekatan ilmiah/penelitian lapangan.

Konsep Pengembangan

Menurut McGill (1997 : 261) pengembangan adalah suatu perubahan dari yang mikro menjadi makro. Secara makro pengembangan merupakan suatu peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa, proses peningkatan mencakup perencanaan pengembangan dan pengelolaan pegawai untuk mencapai suatu hasil yang optimal, hasil ini dapat berupa jasa, benda atau uang. Hasibuan, (2001 :68), mengemukakan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Dalam hal pengembangan dapat dikemukakan Flippo (dalam Martoyo (2000 : 62) yaitu suatu istilah yang digunakan untuk meningkatkan usaha ke arah yang lebih besar.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Mangkunegara (2001:43) bahwa pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia (human relation) bagi manajemen tingkat atas dan menengah.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kematangan berpikir yang dibarengi dengan perubahan yang lebih baik. Dengan demikian pengembangan dapat juga diartikan suatu perubahan yang dilakukan secara terencana kearah yang diinginkan.

Berbicara tentang pengembangan terdapat empat aspek yang terkandung didalamnya (Bryant dan White (1997 : 4), yaitu:

1. Memberikan penekanan pada kapasitas (*capacity*), yaitu upaya peningkatan kemampuan beserta energi yang diperlukan..
2. Penekanan pada aspek pemerataan (*equity*) dalam rangka menghindari perpecahan di dalam masyarakat yang dapat menghancurkan kapasitasnya.
3. Pemberian kekuasaan dan wewenang (*empowerment*) yang lebih besar kepada masyarakat. Dengan maksud agar hasil pembangunan dapat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, karena aspirasi dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dapat meningkat. Disamping adanya wewenang untuk memberikan koreksi terhadap keputusan yang diambil tentang lokasi *resource*
4. Pembangunan mengandung pengertian kelangsungan pembangunan yang harus diperhatikan mengingat keterbatasan sumber daya yang ada.

Pengembangan Industri kecil

Industri kecil merupakan usaha ekonomi yang tersebar luas diseluruh daerah, sebagian besar dilakukan oleh golongan ekonomi lemah. Oleh karenanya, industri kecil penting peranannya dalam pemerataan, dari perluasan penyerapan tenaga kerja, perluasan kesempatan berusaha, sampai mendorong pertumbuhan ekonomi. Tumbuhnya para wiraswasta yang sebagian mampu menjadi pengusaha menengah. Dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa serta penghematan devisa, industri kecil dapat berperan dalam penyediaan produk substitusi impor dan meningkatkan produk ekspor.

Kondisi industri kecil dan kerajinan pada saat ini sejumlah unit usaha + 4 juta, tenaga kerja jutaan orang, dengan sentra tersebar di seluruh daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan industri kecil sampai saat ini antara lain adalah :

- a. Dari segi pengusaha dan pengrajin :
 - Kurangnya pengetahuan para pengusaha/pengrajin akan permintaan pasar yang meliputi jenis produk, mutu, jumlah, waktu penyerahan, dan harga yang diinginkan.
 - Kurangnya pengetahuan mengenai system produksi, system manajemen, termasuk keuangan dan pemasaran.
- b. Dari segi pembinaan :
 - Terbatasnya kemampuan aparat Departemen Perindustrian
 - Belum lengkapnya sarana-sarana pembinaan (Unit Pelayanan Teknis).

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah

Kedudukan manusia dalam suatu dunia usaha sangat menentukan karena posisinya selain sebagai objek juga subjek dalam proses pencapaian hasil usaha. Oleh karena itu hidup matinya suatu dunia usaha, faktor manusia sangat menentukan. Pentingnya faktor manusia dalam dunia usaha, maka perlu mendapat perhatian yang lebih besar agar mampu meningkatkan daya saing dalam dunia usaha. Sementara keberadaan manusia dalam dunia usaha belum semuanya ditopang dengan kemampuan, keterampilan sesuai bidang usaha yang dimiliki, dan kondisi inilah yang membuat para pengusaha kurang mampu bersaing disegmen pasar tenaga kerja. Mencermati fenomena tersebut maka perlu pembinaan secara simultan sesuai bidang usaha yang dikembangkan, baik pada usaha industri kecil maupun menengah .

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, terjadinya evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan sesuatu. (Thoha, 1986 : 178). Lebih lanjut dikatakan bahwa ada dua unsur dalam pengertian ini yakni pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan kedua pembinaan menunjuk kepada perbaikan atas sesuatu.

Pada dasarnya pembinaan pegawai merupakan suatu tindakan yang diarahkan untuk kemajuan, peningkatan atau perbaikan atas sesuatu. Dilingkungan dunia usaha bahwa pembinaan karyawan penting dilakukan untuk membentuk kepribadian yang berbudi luhur, dan disamping itu untuk meningkatkan kecakapan, keterampilan dan keahlian dalam menunjang kelancaran usaha.

Memahami tentang pembinaan, dapat dilihat dari sudut pandang, yaitu pembinaan kemanusiaan yakni pembinaan yang dilakukan dengan memenuhi kebutuhan hidup karyawan dan keluarganya baik jasmani maupun rohani. Sedangkan pembinaan keahlian dilakukan dengan memenuhi kebutuhan karyawan untuk bekerjasama mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, dan dalam hal ini tujuan untuk mencapai produktivitas, efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Kedua kebutuhan apabila dipenuhi akan memberikan kontribusi yang berarti bagi para pengusaha dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan pendapat diatas menunjukkan bahwa pembinaan merupakan determinan penting untuk memberikan daya/kekuatan manusia agar menjadi sumber tenaga yang professional sebagaimana yang diarahkan pada tujuan pembinaan itu sendiri.

Pendidikan dan Pelatihan

Menurut John Bella pendidikan dan pelatihan adalah sama dengan pengembangan, yaitu merupakan proses peningkatan keterampilan kerja baik professional maupun manajerial. Pendidikan berorientasi pada teori, dilakukan dalam kelas, berlangsung lama dan biasanya menjawab “Why” sedangkan pelatihan berorientasi pada praktek, dilakukan di lapangan berlangsung singkat dan menjawab “How” (Hasibuan, 1994 : 105). Dari pendapat tersebut di atas tampak adanya perbedaan antara pendidikan dan pelatihan. Pelatihan berhubungan dengan pekerjaan sedangkan pendidikan berhubungan dengan pengetahuan secara umum. Kalau pendidikan bersifat teoritis, sedangkan pelatihan bersifat praktis. Dengan pendidikan dan pelatihan artinya agar karyawan tersebut memiliki keterampilan dan keahlian serta mampu meningkatkan prestasi kerja yang lebih baik. Karena itu dilakukannya pendidikan dan pelatihan karyawan usaha industry kecil dan menengah dengan tujuan untuk merubah sikap dan perilaku karyawan serta menambah kemampuan, keterampilan, kecakapan dan keahlian sebagai modal untuk meningkatkan produksinya.

Pengertian Industri Kecil dan Menengah

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dijelaskan industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya. Sedangkan pengertian industri yang dikaitkan dengan proses pengolahan dan pengembangan industri yang digunakan

sebagai dasar acuan dari pada Departemen Perindustrian, yaitu : industri adalah rangkaian kegiatan dan ekonomi yang meliputi pengolahan, pengerjaan, pengubahan, perbaikan bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang yang berguna dan lebih bermanfaat untuk pemakaian dan usaha jasa yang menunjang kegiatan diatas.

Menurut Biro Pusat Statistik (1993 :53) industri kecil adalah sebuah industri yang mempunyai tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 (sembilan belas) orang tenaga yang terdiri dari pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Dengan demikian dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan industri, sub sektor industri kecil dan kerajinan rakyat diharapkan mempunyai peran strategis, yaitu sebagai penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pembaharuan tata nilai masyarakat.

Dalam perkembangannya industri kecil membawa misi pemerataan yaitu dengan penyebaran kegiatan usaha, peningkatan partisipasi bagi golongan ekonomi lemah, perluasan kesempatan kerja dan dengan pemanfaatan potensi ekonomi terbatas. Dalam rangka menunjang pembangunan daerah, maka pembangunann industri kecil disebar luaskan ke seluruh wilayah melalui penetapan pusat pertumbuhan industri kecil, sentra industri, lingkungan industri.

Fungsi dari pusat-pusat pertumbuhan industry menurut Syahrudin(1989:45) adalah :

1. Sebagai pusat pembinaan dan penyuluhan termasuk bantuan bahan baku dan pemasaran;
2. Sebagai tempat pelengkap peralatan yang tidak dipergunakan bersama untuk suatu wilayah guna menyempurnakan produk;
3. Sebagai sarana kerja untuk sejumlah terbatas pengusaha industry kecil.

Dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan industry ini diharapkan hasil produksi dapat lebih meningkat yang disertai dengan peningkatan mutu produksi sehingga menjadi suatu hasil produksi dengan daya jual yang tinggi.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat diperoleh gambaran bahwa industry kecil mempunyai investasi modal yang relative kecil, sedangkan penggunaan teknologi yang masih sederhana.

Analisis

Sesuai tujuan penelitian maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data model interaktif (*interactive model of analsis*) yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (2004 :16). Untuk keperluan tersebut peneliti menyederhanakan data yang diperoleh kedalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi yang pada hakekatnya merupakan upaya penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh di lapangan selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam.

Hasil Penelitian

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang. Sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan IKM pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang secara implementatif sudah terlaksana dengan baik, namun dengan melihat dari hasil yang dicapai belum mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fenomena yang terjadi diobyek penelitian sebagaimana yang dideskripsikan diatas, maka atas dasar informasi yang dikumpulkan selanjutnya akan dibahas sesuai substansi permasalahan sebagai berikut :

Meningkatkan Kemampuan Ilmu Pengetahuan/SDM

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan/SDM bagi pelaku IKM yaitu melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pelatihan

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang sudah cukup baik dan sangat bermanfaat bagi pelaku IKM, karena dapat meningkatkan kemampuan serta pemahaman kepada pelaku IKM baik dari segi kemampuan teknis maupun kemampuan manajerial. Akan tetapi dari segi hasil yang diperoleh pasca pelatihan sebagian besar pelaku IKM belum dapat mengaplikasikan secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku IKM bahwa ilmu yang didapatkan didalam pelatihan tidak semuanya bisa diaplikasikan dalam menjalankan usahanya karena materi yang didapatkan di pelatihan merasa terlalu tinggi, sementara klasifikasi usaha yang dijalankan masih kategori industri rumah tangga (Home Industri) dengan jumlah karyawan hanya sekitar 1-3 orang, sehingga agak kesulitan untuk penerapannya. Kemudian dari hasil wawancara dari IKM yang lain mengemukakan bahwa pelatihan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang sangat bermanfaat karena dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis terkait desain produk kerajinan. Namun hasil yang dicapai setelah pasca pelatihan juga belum diaplikasikan secara maksimal bahkan ada yang belum mengaplikasikan sama sekali. Adapun yang menjadi alasan sehingga aplikasi ilmu keterampilan yang diperoleh pasca pelatihan tidak terlaksana adalah : Faktor bahan baku yang tidak tersedia di Bontang dan harus membeli dari luar daerah di Pulau Jawa, pemasaran terhadap produk yang dihasilkan sangat sulit sehingga tidak bisa di produksi secara kontinyu.

2. Pendampingan

Berdasarkan observasi dilapangan bahwa pendampingan yang dilaksanakan oleh dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang sudah berjalan dengan baik dan sangat membantu terhadap pelaku IKM dalam menjalankan usahanya.

Adapun jenis pendampingan yang diberikan oleh tenaga pendamping kepada pelaku IKM adalah : Mengidentifikasi serta memberikan solusi setiap permasalahan yang dialami oleh Pelaku IKM, memfasilitasi pelaku IKM dalam kegiatan pelatihan, promosi, bantuan peralatan kemasan dan sarana produksi. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendampingan adalah terbatasnya kemampuan pengetahuan tenaga pendamping, Letak Kantor Disperindagkop dan UMKM berkedudukan di luar Kota Bontang sementara lokasi tempat usaha IKM berada di dalam Kota Bontang dengan jarak sekitar 25 Km sehingga agak sulit untuk melakukan pendampingan dilapangan, kurangnya sarana pendukung untuk melakukan pendampingan seperti peralatan kamera untuk dokumentasi. Kemudian tenaga pendamping yang ada di Dinas Perindagkop dan UMKM yaitu hanya berjumlah 2 (dua) orang, sementara jumlah IKM yang ada di Kota Bontang sekitar 700 unit usaha, oleh karena itu pendampingan terhadap IKM dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2013 jumlah IKM yang didampingi sebanyak 30 unit usaha, dengan masing-masing tenaga pendamping mendampingi 15 unit usaha IKM. Apabila IKM yang didampingi tersebut sudah dianggap berkembang dan mampu untuk mandiri, maka akan dilepas dari pendampingan kemudian diganti dengan IKM baru.

3. Magang/Studi banding

Hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa kegiatan magang/studi banding sangat baik yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pelaku IKM, namun dari segi hasil yang dicapai belum maksimal. Untuk kegiatan magang permasalahannya adalah :

- Waktu pelaksanaan magang yang relatif singkat yaitu maksimal 4 (empat) hari, sehingga peserta magang belum dapat menguasai materi yang diberikan.
- Tidak sesuai jenis usaha peserta magang dengan jenis magang yang diikuti, sehingga setelah pasca magang mereka tetap fokus terhadap usaha yang digelutinya.

Sedangkan kegiatan studi banding permasalahannya adalah :

- Metode yang digunakan dalam kegiatan studi banding adalah hanya mengunjungi lokasi tempat usaha IKM daerah lain, tanpa dibarengi dengan kegiatan praktek.
- Tidak sesuai potensi daerah dengan potensi daerah yang akan dikunjungi sehingga tidak dapat diaplikasi lebih lanjut.

4. Sosialisasi peraturan

Peraturan adalah merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dapat dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam menjalankan suatu kegiatan atau usaha. Agar peraturan ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka sangat diperlukan adanya sosialisasi kepada pihak pengguna peraturan.

Hasil pengamatan dilapangan mengenai sosialisasi peraturan perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang menunjukkan bahwa belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga sebagian

besar pelaku IKM belum memahami peraturan – peraturan khususnya di bidang perindustrian. Mencermati fenomena tersebut, maka perlu adanya kegiatan khusus sosialisasi peraturan mengenai perindustrian kepada pelaku IKM, agar apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai pelaku industri dapat terlaksana dengan baik.

Memberikan Fasilitas Permodalan/Sarana Produksi

Fasilitas permodalan/sarana produksi adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh pelaku IKM dalam menjalankan usahanya, oleh karena itu perlu dilakukan fasilitas meliputi :

1. Bantuan Dana Bergulir

Berdasarkan hasil observasi bahwa bantuan dana bergulir oleh Pemerintah Kota Bontang untuk sementara ditutup, yaitu sejak dari tahun 2008 hingga saat ini belum dapat disalurkan kepada pelaku UMKM, karena sambil menunggu proses legalitas tata kelola Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Bantuan Dana Bergulir Pemkot Bontang sangat dirasakan manfaatnya oleh pelaku IKM, karena dengan suku bunga yang rendah yaitu 6 % per tahun sangat membantu IKM dalam mengembangkan usahanya. Bantuan permodalan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian untuk memberdayakan kepada pelaku UMKM yang ada di Bontang.

2. Bantuan Sarana Produksi

Hasil observasi dilapangan bahwa bantuan sarana produksi yang diberikan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM sangat membantu pelaku IKM dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas produknya, sehingga produk yang dihasilkan dapat berdaya saing tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan terkait pemberian peralatan produksi kepada IKM yaitu : Masih terdapat peralatan yang diberikan kepada IKM tidak dapat difungsikan, dikarenakan penggunaan peralatan tersebut menghasilkan produk yang kurang baik kualitasnya, disamping itu terdapat jg peralatan tidak dapat difungsikan oleh IKM karena daya listrik peralatan tersebut telalu tinggi, sementara kapasitas listrik yang dimiliki IKM terbatas.

Memberikan Fasilitas Pemasaran

Untuk membantu akses pemasaran produk IKM Kota Bontang, maka Dinas Perindagkop dan UMKM memberikan fasilitas pemasaran melalui :

1. Fasilitas Outlet Penjualan

Dari hasil penelitian bahwa fasilitas outlet penjualan secara umum sangat bermanfaat bagi pelaku IKM, karena dengan adanya fasilitas ini dapat membantu pemasaran produk IKM sehingga dapat meningkatkan penjualan produk. Namun demikian masih terdapat permasalahan yang muncul yaitu : tidak lancarnya

pembayaran atas barang IKM yang terjual di outlet sepinggan Balikpapan, sehingga akan mengganggu perputaran modal pelaku IKM. Hal ini terjadi karena pihak pengelola outlet yang sudah ditunjuk oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang harus menunggu uang hasil penjualan terkumpul lebih dahulu baru diserahkan ke pihak IKM, selain itu kadang juga digunakan untuk menanggulangi gaji petugas outlet ketika gaji mereka belum cair dari Dinas, nanti setelah gaji mereka cair dari Dinas baru digantikan uang penjualan IKM. Masalah lain yang muncul adalah di outlet UMKM center yang berlokasi di Bontang yaitu : Sebagian produk yang ada kurang laris, sehingga sering terjadi produk yang kadaluarsa. Hal ini diakibatkan karena faktor tempat penjualan UMKM center yang tampilannya dari luar kurang jelas dilihat oleh konsumen dan terkesan hanya sebagai kantor saja, padahal selain difungsikan sebagai kantor UPT dana bergulir juga sebagai tempat penjualan produk IKM.

2. Promosi/Pameran

Kegiatan promosi/pameran yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah salah satu kegiatan yang sangat digemari dan diminati oleh pelaku IKM, apalagi kalau promosi/pameran dilaksanakan di luar daerah. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa pelaku IKM sangat senang dengan adanya kegiatan pameran yang melibatkan IKM, karena kegiatan promosi/pameran adalah kesempatan yang baik untuk memperoleh penjualan secara maksimal. Disamping itu manfaat lain yang dapat diperoleh oleh IKM pada saat pameran adalah menjalin kerjasama pemasaran dan bahan baku, serta dapat melihat, membandingkan dan mengadopsi inovasi produk yang ditampilkan daerah lain. Permasalahan yang terjadi adalah peningkatan penjualan yang didapatkan IKM hanya sebatas pada saat pameran saja, akan tetapi setelah pasca pameran tidak terjadi peningkatan penjualan. Padahal tujuan utama dilaksanakannya kegiatan pameran adalah untuk mempromosikan potensi produk unggulan serta membuka peluang investasi daerah, sehingga terjalin kerjasama di bidang pemasaran .

3. Sertifikasi

Berdasarkan observasi dilapangan bahwa fasilitasi sertifikasi oleh Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang sangat bermanfaat terhadap pelaku IKM khususnya sertifikasi halal, karena dengan sertifikasi halal ini akan memberikan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan suatu produk yang di pasarkan sehingga akan meningkatkan penjualan produk IKM.

Adapun permasalahan yang terjadi adalah proses pengurusan sertifikasi halal yang agak lama yaitu sekitar 2 (dua) bulan. Hal ini diakibatkan karena harus melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari identifikasi persyaratan permohonan sampai pada tahap audit internal dengan melakukan survey di lokasi tempat usaha, setelah itu hasil dari audit internal dilakukan sidang fatwa oleh para Kiyai LP POM MUI untuk menentukan layak atau tidak untuk memperoleh sertifikat

halal. Disamping itu untuk pengurusan sertifikat halal ini harus melalui LP POM MUI Samarinda karena di Bontang belum terbentuk LP POM. Kemudian pengurus LP POM MUI Samarinda rata-rata berprofesi sebagai dosen, sehingga ketika akan dilakukan audit internal harus menyesuaikan waktunya agar tidak mengganggu aktifitasnya sebagai dosen.

Faktor-faktor yang Menghambat Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bontang

- a. Kurangnya aparat Pembina IKM khususnya tenaga penyuluh, fasilitator dan pendamping IKM yang ada di Dinas perindagkop dan UMKM Kota Bontang, sehingga tidak seimbang antara jumlah IKM yang akan dibina sekitar 700 unit usaha dengan jumlah Pembina yang tersedia.
- b. Sebagian aparat pembina IKM yang ada pada Dinas Perindagkop dan UMKM tidak sesuai dengan kompetensi (basic pendidikan) yang dimiliki, sehingga merasa kesulitan dalam melakukan pembinaan terhadap IKM.
- c. Terbatasnya kemampuan aparat Pembina IKM
- d. Terbatasnya alokasi anggaran untuk keperluan kegiatan pembinaan IKM, sehingga tidak semua program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana.
- e. Adanya sikap dan perilaku pelaku IKM yang terkesan manja, sehingga apapun yang diinginkan untuk mengembangkan usahanya selalu mengharap bantuan dari pemerintah.
- f. Karakteristik dan pola pikir pelaku IKM tidak mudah untuk berubah.
- g. Kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum bahwa pelaksanaan pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang sudah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat terhadap pengembangan usaha pelaku IKM di Kota Bontang, namun secara aplikatif serta hasil yang dicapai pasca pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan pelatihan, magang/studi banding, pendampingan, sosialisasi peraturan, bantuan dana bergulir, bantuan peralatan produksi, outlet penjualan, promosi/pameran dan sertifikasi belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal.
2. Faktor – faktor yang menghambat terhadap pelaksanaan pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah : Kurangnya aparat Pembina IKM khususnya tenaga penyuluh dan pendamping sehingga tidak seimbang antara jumlah IKM yang akan di bina dengan jumlah Pembina yang tersedia, Sebagian aparat Pembina yang ada di Dinas Perindagkop dan UMKM tidak sesuai dengan kompetensi (basic

pendidikan) yang dimiliki sehingga agak kesulitan dalam melakukan pembinaan, terbatasnya kemampuan aparat Pembina IKM, terbatasnya alokasi anggaran untuk keperluan kegiatan pembinaan IKM sehingga tidak semua program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana, adanya sikap dan perilaku IKM yang terkesan manja sehingga apapun yang diinginkan selalu mengharap bantuan dari pemerintah, karakteristik dan pola pikir pelaku IKM tidak mudah untuk berubah, kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan.

Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk menunjang kelancaran aktivitas pembinaan IKM pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang perlu adanya penambahan aparat Pembina sesuai dengan basic pendidikan, khususnya tenaga penyuluh dan pendamping IKM sebagai ujung tombak pembinaan secara langsung dilapangan.
2. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pembinaan IKM, Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang hendaknya melakukan evaluasi secara mendalam terhadap program kegiatan yang sudah berjalan.
3. Guna tercapainya target pembinaan IKM secara berkelanjutan dan tepat sasaran, maka perlu dibuat suatu perencanaan berupa penyusunan master plan pembinaan IKM.
4. Perlunya ditingkatkan pendidikan dan latihan bagi aparat Pembina dan pelaku IKM secara berkelanjutan sesuai kebutuhannya, agar pembinaan IKM dapat mencapai hasil yang lebih baik.
5. Perlunya dilakukan shearing program pembinaan IKM dengan pihak perusahaan melalui program CSR.
6. Memfasilitasi dan membuka akses permodalan bagi IKM dengan program bantuan dana bergulir.
7. Meningkatkan akses promosi/pemasaran produk IKM, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan pengusaha supermarket, swalayan, hotel serta penjualan melalui media website.
8. Memfasilitasi dan membantu pelaku IKM dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yaitu dengan melakukan kerjasama dengan daerah lain sesuai potensi yang ada.
9. Diperlukan penelitian lanjutan dari hasil penelitian untuk menentukan skema dan pola pembinaan yang efektif berdasarkan permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka

- _____, 2005. *Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Sebagai Upaya Untuk Menghadapi Era Perdagangan Bebas* (A. Harits Nu'man).

- _____, 2006. *Industrialisasi serta pembangunan sektor pertanian dan jasa menuju visi indonesia 2030 (Hartarto Sastrosoenarno)*.
- _____, 2008. *Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Sebagai Sarana Memperkokoh Struktur Ekonomi Nasional*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi.
- _____, 2010. *Implementasi Kebijakan Pengembangan IKM Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Dan ESDM Kabupaten Kulon Progo*.
- _____, 2010. *Manajemen Industri Kecil dan Menengah*. Sistim Industri I.